MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 350/DJMT.1/ST.KP7.1/VII/2025

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan Kualitas Mutu Manajemen dan Pelayanan Peradilan serta Meningkatkan Performa Kinerja Organisasi dan Aparatur Pengadilan yang Profesional.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 67/DJMT/KEP/PW1/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Layanan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Sudiyono, S.H., M.H./ 197012191998031003, Pembina Tingkat I (IV/b), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganismintun;
2. Meitina Kardina, S.E./ 198505152019032011, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganismintun;
3. Alvin Bagus Setyawan, S.T./ 198812302020121006, Penata Muda (III/a), Pranata Komputer Ahli Pertama.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Layanan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 sd. 8 Agustus 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara